

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

Banyak penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan, salah satunya menurut Procovich (Suyatno, 2009 : 17) bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kota dan desa.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Lincoln Arsyad, 1988 : 58), dijelaskan bahwa ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat

ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Tabel 1.1
Rasio Gini Indonesia Tahun 1986-2010

Tahun	Rasio Gini
1986	0,340
1987	0,320
1988	0,320
1989	0,330
1990	0,330
1991	0,330
1992	0,330
1993	0,340
1994	0,340
1995	0,340
1996	0,356
1997	0,350
1998	0,350
1999	0,308
2000	0,294
2001	0,299
2002	0,329
2003	0,320
2004	0,320
2005	0,363
2006	0,357
2007	0,376
2008	0,368
2009	0,357
2010	0,331
Rata-rata	0,336

Sumber : Statistik Indonesia, BPS

Angka-angka koefisien Gini di dalam tabel 1.1 merupakan Rasio Gini Indonesia Tahun 1986–2010. Data yang ada menunjukkan fluktuasi, mencerminkan bahwa distribusi pendapatan nasional di Indonesia tidak senantiasa membaik dari tahun ke tahun. Berdasarkan kriteria kesenjangan bilangan Gini diatas maka dari tahun 1986 sampai tahun 2004 yang angka koefisien Gininya berkisar antara 0,20 – 0,35 dapat disimpulkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia secara umum masih digolongkan rendah, namun pada tahun 2005 pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sehingga menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan membawa dampak angka koefisien Gini meningkat menjadi 0,363 yang diikuti pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2006, 2007 2008 dan 2009 dengan angka koefisien Gini 0,357, 0,376, 0,368, 0,357 yang berarti terjadi perubahan yang cukup mendasar dan sudah masuk ke dalam kisaran angka koefisien Gini $> 0,35 - < 0,50$ atau kesenjangan sedang. Kemudian tahun 2010 kembali membaik, angka koefisien gini menjadi 0,331, ini mulai terjadi perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, dan masuk dalam kategori angka koefisien Gini 0,20 – 0,35 yang berarti kesimpulanya kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia secara umum kembali membaik dan masih digolongkan ke dalam ketimpangan rendah.

Pada tahun 2010 kenaikan kesenjangan distribusi pendapatan ini dapat diatasi pemerintah dengan berbagai kebijakan seperti menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara absolut seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan

masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian dan industri sebagai lokomotif pembangunan sehingga memiliki dampak yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi inilah yang harus dikawal.

Distribusi Pendapatan atau pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Rasio Gini. Untuk mengukur kesenjangan Bilangan Gini didasarkan pada kurva Laurens yang angkanya berkisar 0 – 1, dengan kriteria kesenjangan : 0,50 – 0,70 = kesenjangan tinggi; > 0,35 - < 0,5 = kesenjangan sedang; 0,20 – 0,35 kesenjangan rendah (Suyatno, 2009:30). Koefisien Gini itu sendiri, bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapisan. Namun setidaknya cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional. Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah tercapainya masyarakat adil dan sejahtera. Agar tercapainya tujuan ini pemerintah dituntut dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Arah dari pembangunan nasional adalah mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. (Boediono, 1994 : 1 - 2)

Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1986-1997. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu - 13,12 %, hal ini disebabkan karena krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999-2010 baru dapat tumbuh lagi pertumbuhannya walaupun tidak sepesat pada tahun-tahun sebelumnya.

Upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin telah dilakukan sejak era pembanguan 5 tahun. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengetahui keberadaan penduduk miskin disetiap kabupaten diseluruh propinsi. Dengan mengetahui lokasi mereka program pembangunan diharapkan dapat dirumuskan lebih cepat dan tepat.

Permasalahan pertumbuhan penduduk, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran merupakan hal yang dapat menentukan seberapa besar tingkat pertumbuhan/perkembangan Perekonomian di suatu Negara. Aspek kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai Universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.

Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan (menganggur). Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta ketrampilan mereka. Ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Dengan demikian, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sektor kependudukan, terutama pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja baru yang akan memasuki pasar kerja (labor market).

Disisi lain Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Apabila inflasi ditekan dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, sedangkan tingkat

pengangguran adalah salah satu simbol dari rendahnya produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Pembicaraan mengenai Inflasi di Indonesia mulai populer ketika laju inflasi demikian tinggi hingga mencapai 650 persen pada tahun 1966. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*). Berdasarkan pengalaman pahit tersebut, pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi. Pada tahun 1972 sampai dengan 1980an rata-rata laju inflasi di Indonesia masih berada pada level dua digit, tetapi pada tahun 1984 sampai tahun 1996 laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membuat laju inflasi di Indonesia naik menjadi dua digit yaitu sebesar 11,05 persen dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 77,63 persen (Badan Pusat Statistik). Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis moneter mulai mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari menurunnya laju inflasi sebesar 77,63 persen menjadi 2,01 persen pada tahun 1999. Laju inflasi pada tahun 2001 sampai 2002 kembali naik pada level 2 digit yaitu sebesar 12,55 persen dan 10,03 persen. Penyebab tingginya laju inflasi tersebut, selain kondisi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif juga dipicu oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan telepon (Badan Pusat Statistik).

Selanjutnya pada tahun 2003 hingga 2010 Inflasi terus terjadi dengan nilai yang terbilang tinggi dan berfluktuasi yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2005 dengan nilai sebesar 17,11% adalah inflasi tertinggi pasca

krisis moneter Indonesia (1997/1998), tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebabkan Pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia mengingat konsumsi BBM mencapai 47.4 % (tahun 2000) dari total konsumsi energi Indonesia.

Jika semua permasalahan di atas tidak segera diatasi, maka akan semakin banyak jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat nutrisi dan gizi masyarakat rendah, tingkat pendidikan yang dapat dicapai rendah. Pada kelanjutannya menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan rendahnya angka harapan hidup (*life expectancy*).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diduga pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Makanya masalah ini perlu segera dicarikan jalan penyelesaiannya agar terjadi distribusi hasil pembangunan yang merata yang seadil-adilnya. Untuk itu, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 1986 - 2010”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010 ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010 ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010 ?
4. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pertumbuhan penduduk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1986-2010.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pertumbuhan Penduduk terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai distribusi pendapatan di Indonesia.

Kegunaan secara praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak terkait seperti pemerintah, dan lembaga swasta dalam menanggulangi masalah yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia.